

Kerangka Acuan Kegiatan
Diskusi Daring “Urgensi Kolaborasi dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum”
Dalam Rangka Indonesia Open Government Week 2024

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan pada aspek partisipasi dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan melalui inisiatif Open Government Indonesia (OGI). Open government atau keterbukaan pemerintah merupakan upaya mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah, diantaranya transparansi, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif, melalui semangat ko-kreasi (*co-creation*) antara pemerintah (*government*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Inisiatif OGI dimulai sejak tahun 2011 setelah Indonesia bersama 8 (delapan) negara lainnya mendeklarasikan komitmen global Open Government Partnership (OGP).

Sejak 2011 hingga saat ini, pemerintah Indonesia bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah menjalankan 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI). Pada RAN OGI VII Periode 2023-2024, terdapat 15 komitmen dalam 6 isu strategis yang dijalankan, antara lain isu strategis anti-korupsi dan anggaran; ruang kewargan dan demokrasi; pelayanan publik yang inklusif; akses terhadap keadilan; kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; dan energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Proses ko-kreasi antara pemerintah dan OMS dalam pelaksanaan RAN OGI telah membuahkan sejumlah capaian, diantaranya tersedianya layanan informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi; tersedianya sistem informasi pengadaan barang dan jasa; tersedianya mekanisme aduan masyarakat terkait pelanggaran dan disinformasi pemilu; terbukanya akses pelayanan publik bagi kelompok marginal; terbukanya akses partisipasi bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan; dan sejumlah capaian lainnya.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kendala dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah Indonesia. Misalnya, pada komitmen aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia, perlu dilihat bagaimana implementasi dan evaluasinya termasuk dari sisi kebijakannya. Sementara itu, partisipasi masyarakat sipil secara luas dan bermakna dalam kerangka akuntabilitas sosial kebijakan, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan ko-kreasi keterbukaan pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum dan peta jalan penyelenggaraan open government yang berkelanjutan.

Pada 27-31 Mei 2024 yang akan datang, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia bersama OMS Keterbukaan Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Open Government Week (OGI Week 2024). Momentum ini menjadi penting untuk melihat kembali perjalanan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah di Indonesia. Lebih jauh, OGI Week 2024 menjadi momen krusial untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan keterbukaan pemerintah di Indonesia, mengingat pada Oktober 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, dalam rangkaian penyelenggaraan OGI Week 2024 ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang tergabung bersama OMS Keterbukaan Pemerintah Indonesia berko-kreasi dengan Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung RI berinisiatif menyelenggarakan diskusi secara daring dengan judul **“Urgensi Komitmen Ko-Kreasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum”**.

2. Tujuan

Kegiatan diskusi dalam rangkaian Open Government Week 2024 ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi, tantangan, dan praktik baik dalam hal aksesibilitas dan akuntabilitas dalam proses peradilan terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum
- b. Mendengar komitmen keberlanjutan penyelenggaraan Open Government Indonesia terkhusus komitmen aksesibilitas dan akuntabilitas dalam proses peradilan terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum

3. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan berlangsung pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Pukul : 13.00 - 15.00 WIB
Lokasi : Zoom Meeting
Format : Diskusi Daring

4. Target Peserta

Kegiatan ini akan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Open Government Indonesia, antara lain:

- a. Kementerian dan Lembaga pelaksana komitmen Open Government Indonesia
- b. Organisasi Masyarakat Sipil Keterbukaan Pemerintah Indonesia
- c. Media

- d. Akademisi, mahasiswa perguruan tinggi, dosen, dan peneliti
- e. Masyarakat umum yang tertarik pada isu kelompok rentan dan keterbukaan pemerintah Indonesia

5. Pembicara

- a. Moderator: Perwakilan IJRS
- b. Narasumber:

1. *Perwakilan IJRS*

Pembahasan paparan: Hasil penelitian IJRS terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di proses peradilan, ko-kreasi dengan APH dalam menyusun kebijakan terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan urgensi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

2. *Perwakilan Kejaksaan RI*

Pembahasan paparan: Praktik baik, tantangan, dan hambatan yang dialami dalam penanganan perkara dan implementasi kebijakannya terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Proses Peradilan Pidana) dan ko-kreasi bersama masyarakat sipil dalam memastikan aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan

3. *Perwakilan Mahkamah Agung*

Pembahasan paparan: Praktik baik, tantangan, dan hambatan yang dialami dalam penanganan perkara dan implementasi kebijakannya terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) dan ko-kreasi bersama masyarakat sipil dalam memastikan aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan

6. Agenda

Waktu (GMT+7)	Durasi	Kegiatan
08.50 - 09.00	10 menit	Registrasi Zoom Meeting
09.00 - 09.10	10 menit	Moderator Membuka Acara dan Memperkenalkan Narasumber

09.10 - 09.30	20 menit	Pemaparan IJRS
09.30 - 09.50	20 menit	Pemaparan Kejaksaan RI
09.50 - 10.10	20 menit	Pemaparan Mahkamah Agung RI
10.10 - 10.50	40 menit	Diskusi dan tanya jawab
10.50 - 11.00	10 menit	Penutupan oleh Moderator